

PENINGKATAN KOORDINASI DAN SINERGITAS BPK DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM

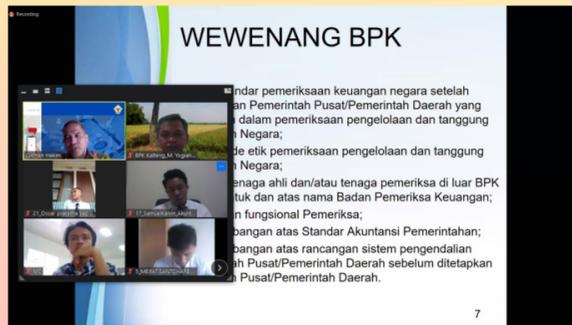


Selasa, 11 Agustus 2020, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ade Iwan Ruswana menghadiri secara virtual kegiatan penandatanganan nota kesepahaman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang digelar di kantor BPK Pusat Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan sinergi dan koordinasi serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan perluasan lingkup Kerjasama baik dalam bidang pemeriksaan maupun non pemeriksaan. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Jaks Agung S.T. Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz di Kantor Pusat BPK Jakarta. Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, Anggota VII BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Pejabat Pimpinan Madya di lingkungan BPK. Selain itu hadir pula secara virtual Anggota BPK, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPK, Kejaksaan RI dan Polri, para Jaks Agung Muda dan juga para Kajati dan Kapolda seluruh Indonesia serta wakil dari Kajari dan Kapolres dari 34 provinsi. Nota Kesepahaman antara BPK dengan Polri berisi tentang kesepakatan kerjasama dalam rangka pemeriksaan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Sedangkan bersama Kejaksaan RI, BPK menyepakati kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Nota kesepahaman ini merupakan pembaharuan dari nota kesepahaman/MoU yang sudah ada sebelumnya. Sambutan Ketua BPK menyampaikan bahwa dengan adanya Nota Kesepahaman antara BPK-Kejaksaan RI dan BPK-Polri diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergitas instansi.

Redaksi

Penanggung Jawab : Ade Iwan Ruswana
Redaktur : Dionisius Yudianto
Editor : Bambang Budi Purwanto
Web Admin : Dica Surya Cardina
Web Developer : Arunida Wibisono
Desain Grafis : Achmad Anshari
Fotografer : Muys
Pembuat Arikel : Artha Magdalena Sitanggang
Sekretariat : Nurul Latifah

PARTISIPASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM KEGIATAN ORIENTASI PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS KEPADA MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS PALANGKARAYA



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Hari Jum'at 4 September 2020, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya. Sebagai narasumber/pemateri dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah I, Bpk. Lukman Hakim. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya. Bpk. Lukman Hakim memberikan materi seputar pengenalan Badan Pemeriksa Keuangan diantaranya terkait kedudukan BPK, tugas dan wewenang BPK, visi dan misi BPK, dan hasil pemeriksaan BPK. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para mahasiswa. BPK Perwakilan Kalimantan Tengah sangat mendukung kegiatan ini karena sebagai bentuk pengenalan awal dunia kerja kepada mahasiswa, dimana nantinya setelah lulus kuliah, mereka akan terjun ke dunia kerja.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NARASUMBER DALAM WORKSHOP HUBUNGAN PERS DAN PEMERINTAH DAERAH



Senin 31 Agustus 2020, Kepala Perwakilan Ade Iwan Ruswana yang diwakili oleh Kepala Subbagian Hukum Henry Angga Sulistyio menghadiri kegiatan Workshop Hubungan Pers dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Hotel Neo Palma Palangkaraya. Kegiatan ini diikuti oleh 30 awak media di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Henry Angga Sulistyio mewakili Kepala Perwakilan sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut beliau menyampaikan paparan dengan judul Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Media Ditinjau dari Akuntabilitas Keuangan. Bapak Henry Angga Sulistyio dalam pemaparannya juga menyampaikan peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Negara meliputi Tugas Badan Pemeriksa Keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2. Beliau juga menyampaikan Tugas BPK sebagai Lembaga Negara yang memeriksa Pengelola Keuangan Negara dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah



TAHETA Edisi 111/2020

Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75



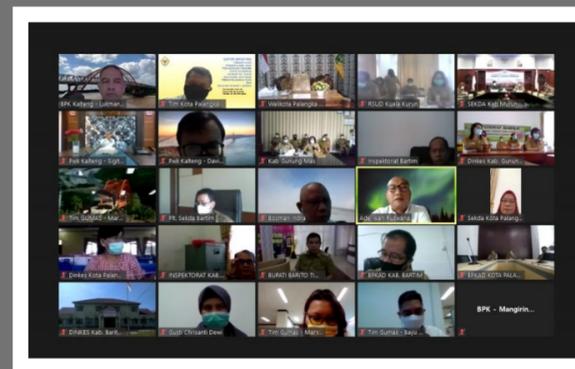
PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 75 DITENGAH PANDEMI COVID-19

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke 75 Republik Indonesia yang jatuh pada Senin, 17 Agustus 2020, seluruh pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tetap melaksanakan Upacara Pengibaran Bendera ditengah pandemik COVID-19. Upacara Bendera dilaksanakan dengan melalui media televisi di rumah masing-masing pegawai baik PNS, TTT, dan OB secara physical distancing serta mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 perihal Pedoman Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 dalam situasi pandemi COVID-19 dilanjutkan dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 782/ND/X/08/2020 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2020 di Lingkungan Kantor Pusat, Badan Diklat PKN dan Perwakilan. Upacara Bendera di Perwakilan dilaksanakan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengikuti Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan oleh stasiun televisi di wilayah tempat tinggal masing-masing.

- Mengidentifikasi kriteria yang dapat digunakan dalam pemeriksaan terinci;
- Mengidentifikasi jenis dan sumber-sumber bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan terinci; dan
- Memutuskan apakah suatu masalah layak untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dalam pemeriksaan terinci.

Selain itu para Kepala Daerah menyampaikan kesiapannya dalam melaksanakan metode pemeriksaan secara bertatap muka maupun dengan daring. Mereka berharap adanya rekomendasi dari hasil pemeriksaan tersebut agar dapat membantu penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kalimantan Tengah.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MELAKSANAKAN ENTRY MEETING DENGAN ENAM ENTITAS UNTUK PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KINERJA DAN PDTT PENANGANAN COVID-19 SECARA DARING



Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ade Iwan Ruswana pada hari Senin, 7 September 2020 melaksanakan Entry Meeting kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu (PDTT) atas penanganan Covid-19 terhadap enam entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan diikuti oleh seluruh tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditugaskan dalam Pemeriksaan Kinerja dan PDTT beserta dengan seluruh Kepala Daerah enam entitas atau yang mewakili yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Walikota Palangka Raya, Bupati Barito Timur, Wakil Bupati Gunung Mas, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya. Entry meeting dilaksanakan secara serentak dan daring dalam rangka mematuhi protokol penanganan Pandemi Covid-19 yaitu physical distancing. Pemeriksaan Kinerja Penanganan Covid-19 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan PDTT Penanganan Covid-19 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Pemeriksaan akan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan maupun dengan metode daring.

Bapak Ade Iwan Ruswana menyampaikan bahwa pemeriksaan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan saat ini dan pemeriksaan terinci. Beliau juga menyampaikan tujuan dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja tematik Penanganan Covid-19 untuk dapat memperoleh pemahaman hal pokok/objek pemeriksaan seperti:

- Mengidentifikasi masalah yang akan dilakukan pemeriksaan secara mendalam;
- Memetakan permasalahan yang ada dengan tujuan pemeriksaan secara menyeluruh (audit universe)
- Menentukan area kunci yang akan menjadi fokus dalam pemeriksaan terinci pemeriksaan kinerja;
- Merumuskan tujuan-tujuan potensial pemeriksaan dan memberikan alasan mengapa tujuan tertentu dinilai memegang prioritas tertinggi;
- Menentukan lingkup pemeriksaan;